

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmad dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua serta tidak lupa juga mengucapkan salawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan kealam yang lebih beriman dan berpendidikan sebagaimana saat ini sehingga ***Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022*** telah dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD.

Sementara itu Renja Tahun 2022 SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di susun dan buat mengacu kepada **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijabarkan melalui Renja Tahun 2023 merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari suatu rencana yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang telah merencanakan pembangunan dan Program Prioritas selama empat tahun mendatang. Perencanaan

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2023

merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan yang lebih tepat dimasa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dan pertimbangan sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan suatu perencanaan tahunan yang dikenal dengan perencanaan kerja untuk dituangkan dalam Renja Tahun 2023.

Untuk itu kita harapkan Renja Tahun 2023 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dalam penyusunan dokumen Renja tentunya masih terdapat kekurangan, namun upaya untuk melakukan penyempurnaan akan terus dilakukan demi terwujudnya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Akhirnya mengingat Renja yang disusun merupakan komitmen bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka diharapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.



Banda Aceh, Mei 2022
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,

Ir. CUT HUZAIMAH, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660217 199203 2 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT ACEH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021. <i>Tabel T-C. 29</i>	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 30</i>	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	35
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 31</i>	35
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan.....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT ACEH	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023	46
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	68
BAB V PENUTUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat 1 poin (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa Penyusunan RKPD mencakup Penelaahan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berperan dalam membangun di bidang Pertanian memerlukan sistem perencanaan secara simultan yang mempertimbangkan faktor kondisi riil wilayah/daerah, anggaran, kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja diarahkan pada perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melaksanakan tugas serta pekerjaan percepatan pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara lebih maju menuju swasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun

2018-2023, Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Periode Tahun 2018-2023.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sistem penganggaran sebelumnya masih menggunakan sistem *money follow function*, dimana anggaran mengikuti tugas dan fungsi pada kementerian lembaga. Sejak tahun 2017, anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, inilah yang disebut *Money Follow Program*, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran.

Melalui pendekatan ini diharapkan :

1. adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat;
2. program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;
3. mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antarprogram dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengacu pada Rencana Strategis 2023-2026 yang berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Aceh Tahun 2012-2032 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 akan

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan memerlukan perhatian dan penanganan khusus adalah 1) Penanganan Covid-19; 2) Demokrasi; 3) dana Otsus; dan 4) Pekan Olahraga Nasional.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 adalah: Pertumbuhan PDRB dari 2,79 persen menjadi 4,25 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,18 menjadi 73,18; Prosentase Penduduk Miskin dari 15,53 persen menjadi 13,53 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,3 persen menjadi 5,12 persen; PDRB per Kapita (ADHK) dari Rp. 25,36 juta menjadi Rp. 26,88 juta; dan Indeks Gini dari 0,323 persen menjadi 0,298 persen.

Dinas Pertanian dan perkebunan memiliki peran strategis pada sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan upaya mensinergikan prioritas daerah dengan Agenda Prioritas Nasional karena sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas nasional mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang didalamnya mengamanatkan 3 (tiga) tujuan yaitu : 1) Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pertanian serta 9 (Sembilan) sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; 2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional; 3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional; 4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; 5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; 6) Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; 7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional; 8) Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sejalan dengan Agenda Prioritas Nasional untuk memajukan sektor pertanian di Provinsi Aceh melalui pertanian dan perkebunan berbasis kerakyatan. Maka program pembangunan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Aceh di

fokuskan pada perbaikan produksi untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industry olahan, terutama peningkatan kesejahteraan petani yang terukur dalam Nilai Tukar Petani (NTP), peningkatan SDM/penguatan kelembagaan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, pengembangan inovasi dan kemitraan, serta pemanfaatan teknologi 4.0.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RENJA Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penginputan Rancangan Awal RKPA dalam SIPD tanggal 01 s.d 11 Februari 2022;
2. Penyampaian Rancangan Awal Renja SKPA kepada Bappeda tanggal 14 s.d 17 Februari 2022;
3. Penyampaian Rancangan Renja SKPA kepada Bappeda tanggal 07 Maret 2022;
4. Verifikasi kesesuaian Rancangan renja SKPA dengan Ranwal RKPA Tahun 2023 tanggal 08 s.d 09 Maret 2022;
5. Penyampaian SE Gubernur kepada Kepala SKPA tentang Penyusunan Renja SKPA tanggal 11 April 2022;
6. Penginputan Rancangan Renja SKPA kedalam aplikasi SIPD tanggal 05 s.d 08 April 2022;
7. Pembahasan Renja SKPA tanggal 18 s.d 20 April 2022;
8. Desk pembahasan RENJA 2023 di BAPPEDA tanggal 4 Juli 2022.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman;

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 Tahun 2012 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
30. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan ;
31. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
32. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
33. Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan

34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023;
37. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 520 Tahun 2017 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang, sehingga arah dan tujuan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat konsisten dan berkesinambungan. Dimana Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Maksud dan Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan
2. Sebagai instrumen evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023.
3. Sebagai dasar analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam rangka mendukung Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai.
4. Merumuskan isu-isu penting dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
5. Melakukan Review Terhadap RKPA pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD pasal 78 menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RKPD mencakup penelaahan Rencana Kerja (RENJA) Renja Perangkat Daerah.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPA, proses penyusunan Renja SKPA, keterkaitan antara Renja SKPA dengan dokumen RKPA, Renstra SKPA, dengan Renja K/L dan Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBA.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPA.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPA serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPA

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu kepada APBA tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPA

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPA mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPA dan/atau realisasi APBA untuk SKPA yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPA;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPA yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPA perlu terlebih

dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPA yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPA yang disesuaikan menurut SKPA masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Berisikan uraian mengenai :

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPA, diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPA Provinsi dengan SKPK Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Pertanian di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPA;
- Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPA; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja (RENJA) RKPA

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja (RENJA) RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja (RENJA) RKPD, misalnya

: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja (RENJA) RKPA, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

4. Lampiran tabel T-C.31.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPA.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.

4.1. Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- Pengentasan kemiskinan;
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- Pengembangan daerah terisolir.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPA.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Periode 2017 - 2023, dari lima tahun masa pelaksanaan program pembangunan sebagaimana telah dituangkan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Pada Tahun 2021 adalah awal dari pelaksanaan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan Pada Tahun 2021.

Realisasi Capaian Kinerja Program Rencana Kerja tersebut sebagaimana telah didokumentasikan kedalam RKA-APBA dan DPA APBA Tahun 2021. Dari program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 mengalami kenaikan besaran pagu dari Target Kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh, Renstra dan Renja Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Aceh Tahun 2021 sebesar **Rp. 253.752.515.029.-** sedangkan realisasi capaian kinerja program dalam DPA-SKPA Tahun 2021 sebesar Rp. 208.578.951.063.- (82,20%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 45.173.563.965.- (17,80%).

Dari jumlah alokasi pagu pada tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari berbagai sumber dana yaitu DAU sebesar Rp. 47.394.545.888 gaji dan tunjangan, PAA sebesar Rp. 39.311.756.575 gaji dan tunjangan, PPR sebesar Rp. 2.000.000.000, BLUD sebesar Rp. 2.000.000.000, DAU sebesar Rp. 2.340.926.174, DAK sebesar Rp. 4.902.661.000, OTSUS/SILPA OTSUS sebesar Rp. 156.205.864.938, DBH PBP/DBHCHT sebesar Rp. 1.946.956.200, IPDIMP & Jasa Raharja sebesar Rp. 1.383.610.436.-

Realisasi pagu terhadap capaian program tahun 2021 tersebut adanya penurunan realisasi yang disebabkan adanya kegiatan yang dirasionalkan. Dari target dan realisasi capaian rencana kerja tahun 2021 terdapat beberapa perubahan besaran pagu dan

rekening. Adapun penjelasan dari sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) yang tidak dapat dilaksanakan antara lain disebabkan karena :

1. Sisa pembayaran gaji dan tunjangan;
2. Keterbatasan melakukan kegiatan dilapangan akibat Pandemi Covid-19.
3. Sisa Tender.
4. Gagal Tender (pekerjaan tidak terealisasi).
5. Waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas.
6. Efisiensi dari penetapan harga penawaran yang lebih rendah, pantas, dan wajar dan tidak mengurangi kualitas.
7. Efisiensi dari penyediaan jasa surat menyurat, perjalanan dinas, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pembayaran telepon, air, listrik, internet, cetak, penggandaan, honor-honor, penggantian suku cadang, pajak kendaraan bermotor, bahan praktek/keterampilan, pakaian, kelengkapan kerja lapangan, peralatan/perlengkapan pakai habis, Pengadaan Alat Kantor lainnya dan alat bantu keamanan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, asuransi kesehatan, uang saku dan transport peserta pertemuan, jasa nara sumber, jasa pembaca doa/alquran, makanan dan minuman, transportasi, ATK, Pengadaan computer unit/jaringan, pengadaan bangunan gedung kantor, jasa service, pemeliharaan asset tetap dan asset lainnya, seminar kit, dan akomodasi pertemuan/workshop.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (3).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (3.27).

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01).

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 2.814.667.180,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.517.029.045,- (89,43%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 297.638.135 (10,57%).

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 2.377.670.999, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.105.354.148 (88,55%) dan silpa sebesar Rp. 272.316.851 (11,45%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan), Data Statistik dan Informasi Pertanian.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 436.996.181, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 411.674.897 (94,21%) dan silpa sebesar Rp. 25.321.284 (5,79%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 83.035.496.281,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 72.608.851.017,- (87,44%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 10.426.645.264 (12,56%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 83.035.496.281,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 72.608.851.017,- (87,44%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 10.426.645.264 (12,56%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Capaian Target Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Tersedianya gaji dan hak- hak pegawai.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 306.964.670,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 180.154.101,- (58,69%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 126.810.569 (41,31%).

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 189.725.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 77.114.431 (40,65%) dan silpa sebesar Rp. 112.610.569 (59,35%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas.

2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 117.239.670, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 103.039.670 (87,89%) dan silpa sebesar Rp. 14.200.000 (12,11%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan public dan Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 2.101.354.050,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.901.650.938,- (90,50%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 199.703.112 (9,50%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 150.000.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 149.955.631 (99,97%) dan silpa sebesar Rp. 44.369 (0,03%). Capaian dari target sub kegiatan ini adalah Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 837.056.531, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 717.468.229 (85,71%) dan silpa sebesar Rp. 119.588.302 (14,39%). Capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 228.180.569, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 205.474.000 (90,05%) dan silpa sebesar Rp. 22.706.569 (9,95%). Capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 145.420.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 121.081.000 (83,26%) dan silpa sebesar Rp. 24.339.000 (16,74%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

alokasi pagu sebesar Rp. 740.696.950, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 707.672.078 (95,54%) dan silpa sebesar Rp. 33.024.872 (4,46%). Capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 936.001.099 - dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 891.404.164,- (95,24%) Terjadinya silpa sebesar Rp. 44.596.935 (4,76%).

1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 936.001.099 - dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 891.404.164,- (95,24%) Terjadinya silpa sebesar Rp. 44.596.935 (4,76%). Capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan gedung kantor dan Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 19.469.872.555.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 17.748.191.557,- (91,09%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 1.721.680.998.- (8,91%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 42.006.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.

36.663.050 (87,28%) dan silpa sebesar Rp. 5.342.950 (12,72%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Jumlah surat yang terkirim.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 2.481.476.920, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.917.608.452 (76,76%) dan silpa sebesar Rp. 563.868.468 (23,24%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 657.080.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 572.685.440 (87,16%) dan silpa sebesar Rp. 84.394.560 (12,84%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 16.289.309.635, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 15.221.234.615 (93,44%) dan silpa sebesar Rp. 1.068.075.020 (6,56%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 6.687.721.186.- dengan realisasi keuangannya

sebesar Rp. 5.724.945.266,- (85,60%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 962.775.920 (14,40%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 4.029.369.537, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.206.214.403 (79,57%) dan silpa sebesar Rp. 823.155.134 (10,43%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 2.658.351.649, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.518.730.863 (94,75%) dan silpa sebesar Rp. 139.620.786 (5,25%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3.27.02).

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 4.662.360.900- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.486.912.386,- (53,34%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 2.175.448.514 (46,66%).

1. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.

Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 521.135.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 515.043.500 (98,83%) dan silpa sebesar Rp. 6.091.500 (1,17%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi di 22 kabupaten/Kota.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.

Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 4.141.225.900, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.971.868.886 (47,62%) dan silpa sebesar Rp. 2.169.357.014 (52,38%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian di 22 kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 105.402.986.314,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 80.977.169.724,- (76,83%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 24.425.816.590 (13,17%).

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.

Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 975.646.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 972.340.894 (99,66%) dan silpa sebesar Rp. 3.305.106 (0,34%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di 22 kabupaten/Kota.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 57.956.822.702, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 44.870.587.250 (77,42%) dan silpa sebesar Rp. 13.086.235.452 (12,58%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura sebanyak 11 Komoditi.

3. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan.

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 14.466.832.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 10.907.510.808 (75,40%) dan silpa sebesar Rp. 3.559.321.192 (24,60%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi, Jagung dan Ubi Kayu.

4. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 32.003.685.612, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 24.226.730.772 (75,70%) dan silpa sebesar Rp. 7.776.954.840 (24,30%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan sebanyak 5 Komoditi.

- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 3.853.631.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.472.726.805,- (90,12%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 380.904.195 (9,88%).

1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme.

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme., merupakan pendukung dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi alokasi pagu sebesar Rp. 3.853.631.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.472.726.805,- (90,12%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 380.904.195 (9,88%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03).

- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 3.083.944.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.065.168.645,- (99,39%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 18.775.355 (0,61%).

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 302.824.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 301.243.908 (99,48%) dan silpa sebesar Rp. 1.580.092

(0,52%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Prasarana .

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 290.112.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 277.903.900 (95,79%) dan silpa sebesar Rp. 12.208.100 (4,21%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 457.138.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 453.955.543 (99,91%) dan silpa sebesar Rp. 3.182.457 (0,09%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (3.27.05).

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 1.912.281.400,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.785.427.392,- (93,37%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 126.854.008 (6,63%).

1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, merupakan

pendukung dari Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi alokasi pagu sebesar Rp. Rp. 1.912.281.400.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.785.427.392,- (93,37%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 126.854.008 (6,63%).capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan, sebanyak 20 Kegiatan.

V. Program Perizinan Usaha Pertanian (3.27.06).

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 2.868.634.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.757.132.416,- (96,11%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 111.501.584 (3,89%).

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota alokasi pagu sebesar Rp. 2.868.634.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.757.132.416,- (96,11%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 111.501.584 (3,89%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar.

VI. Program Penyuluhan Pertanian (3.27.07).

- a. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar

Rp. 1.536.040.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.497.534.000,- (97,49%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 38.506.000 (12,51%).

1. Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.

Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 1.536.040.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.497.534.000,- (97,49%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 38.506.000 (12,51%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan.

- b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 5.039.100.019.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.307.357.775,- (45,79%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 2.731.742.244 (54,21%).

1. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 719.958.676, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 684.196.904 (95,03%) dan silpa sebesar Rp. 35.761.772 (4,97%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Inovasi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan di 5 Kabupaten.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani., merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 4.319.141.343, dengan capaian realisasi keuangan

sebesar Rp. 1.623.160.871 (37,58%) dan silpa sebesar Rp. 2.695.980.472 (62,42%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

- c. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 10.041.460.375,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 8.657.295.833,- (86,47%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 1.384.164.542 (13,53%).

1. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani.

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan alokasi pagu sebesar Rp. 1.794.748.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.595.444.650 (88,90%) dan silpa sebesar Rp. 199.303.350 (11,10%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani.

2. Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.

Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan alokasi pagu sebesar Rp. 1.583.610.436, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.369.331.500 (86,47%) dan silpa sebesar Rp. 214.278.936 (13,53%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian, Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani.

3. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan alokasi pagu sebesar Rp. 6.663.101.939, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.692.519.683 (85,43%) dan silpa sebesar Rp. 970.582.256 (14,57%). capaian dari target sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian sebanyak 3 Sekolah Kedinasan (SMK-PP) Aceh.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program* dilaukan belum maksimal.
2. Keterbatasan data dan informasi;
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten/Kota;
5. Belum dipahaminya secara utuh tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan ;
6. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPA maupun dalam RPA dalam merencanakan kegiatan.
7. Dalam melaksanakan kegiatan setiap penanggung jawab kegiatan untuk tidak bertumpu pada pencapaian realisasi fisik dan keuangan semata, akan tetapi perlu evaluasi lebih mendalam terhadap pencapaian realisasi manfaat dari pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

8. Perlu merencanakan kegiatan kedepannya untuk dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

- b. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor-faktor penyebab tersebut di atas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada

Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, pada kegiatan peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan dirasakan masih terdapat kendala dalam hal tahapan prosedur administrasi perencanaan dan penyiapan lahan, dan analisa dampak lingkungan maupun kajian terhadap peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan belum

dilaksanakan dalam hal mitigasi resiko bencana maupun dampak lain yang ditimbulkan yang dapat merugikan masyarakat.

- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Mengusulkan anggaran lanjutan untuk kegiatan yang diperkirakan tidak akan selesai pada tahun bersangkutan.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun bersangkutan karena suatu hal maka kegiatan diusulkan anggaran lanjutan.

Kegiatan yang akan diusulkan harus dikaji dulu permasalahannya apakah karena gagal lelang, pelaksanaan terlambat, atau faktor lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2023

Tabel T-C.29

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S/D TAHUN 2021

Nama SKPA : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (2017-2022)	REALISASI KINERJA CAPAIAN PROGRAM (2020)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2022)	PERGIRAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)	
					TARGET RENJA SKPA TAHUN 2021	REALISASI RENJA SKPA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
2.00.03.2.00.03.00 NON PROGRAM										
	Selanjutnya Tidak Langsung	Tertindaknya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
2.00.03.2.00.03.01.01.001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertindaknya Penyempitan Pelayanan Jasa Surat Dalam Percepatan Proses Administrasi	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunal Sumbu Daya Air dan Listrik	Tertindaknya Peningkatan Kualitas Pelayanan	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Tertindaknya peningkatan perengkapan dan peralatan kantor	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.006	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindaknya kenyamanan kinerja aparatur dalam rangka proses pelayanan publik	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.009	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tertindaknya Peningkatan Kualitas Pelayanan	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tertindaknya peningkatan kebutuhan ATK pegawai	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.011	Kegiatan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan pengadaan barang cetakan	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.012	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya kebutuhan alat penerangan gedung kantor	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.015	Kegiatan Penyediaan bahan besan dan peralatan perundang-undangan	Meningkatnya kinerja sumberdaya aparatur pemerintah	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.017	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik dan makan siswa	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.018	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya sinkronisasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.01.022	Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	membarikan kemudahan dalam proses pelayanan dan percepatan administrasi perkantoran	12	Bn	12	Bn				
2.00.03.2.00.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
2.00.03.2.00.03.01.02.003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Tertindaknya pembangunan gedung kantor sebagai fasilitas kinerja aparatur dalam percepatan pelayanan publik	31	Pkt	31	Pkt				
2.00.03.2.00.03.01.02.007	Kegiatan Pengadaan perengkapan gedung kantor	tersedianya perengkapan gedung kantor	34	Keg	34	Keg				
2.00.03.2.00.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung perkantoran	Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	16	Urt	16	Urt				
2.00.03.2.00.03.01.02.042	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor sebagai aset daerah untuk menunjang kinerja aparatur dalam percepatan pelayanan masyarakat	46	Pkt	46	Pkt				
2.00.03.2.00.03.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
2.00.03.2.00.03.01.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas beserta Perengkapannya	Terciptanya kesegaran identitas dan disiplin pegawai Dinas. 4 UPTD dan 3 sekolah kedinasan	2.799	Stal	2.799	Stal				
2.00.03.2.00.03.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										
2.00.03.2.00.03.01.05.001	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	24	Keg	24	Keg				
2.00.03.2.00.03.01.05.002	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya ketertarikan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	24	Keg	24	Keg				
3.27.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
3.27.01.1.01										
3.27.01.1.01.04	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penertasan Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang terwujud tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)								
3.27.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tertindaknya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Data Statistik dan Informasi Pertanian	23	Kab./Kota	23	Kab./Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100	18 Dak.
3.27.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Tertindaknya Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan	23	Kab./Kota	23	Kab./Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100	2 Dak.
3.27.01.1.02										
3.27.01.1.02.01										
3.27.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertindaknya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai	12	Bn	12	Bn	12 Bn	12 Bn	100	995 Org
3.27.01.1.05										
3.27.01.1.05.02										
3.27.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terciptanya kesegaran identitas dan disiplin pegawai Dinas	1039	Stal	1039	Stal			100	100
3.27.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terciptanya motivasi, sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	100	Org	100	Org	12 Bn	12 Bn	100	23 Org
3.27.01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tertindaknya sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	12	Bn	12	Bn	12 Bn	12 Bn	100	5 keg
3.27.01.1.06										
3.27.01.1.06.01										
3.27.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	12	Bn	12	Bn	12 Bn	12 Bn	100	12 Bn
3.27.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sediaan Logistik Kantor	Tertindaknya Pemediaan kebutuhan ATK, Makanan dan minuman	12	Bn	12	Bn	12 Bn	12 Bn	100	12 Bn
3.27.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tertindaknya Penyediaan Barang Cetakan	12	Bn	12	Bn	12 Bn	12 Bn	100	12 Bn
3.27.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Besan dan Peralatan Perundang-undangan	Tersedianya bahan besan dan peralatan perundang-undangan	12	Bn	12	Bn	12 Bn	12 Bn	100	12 Bn

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (2017-2022)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2022)	PERORANGAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)			
					TARGET RENJA SKPA TAHUN 2021	REALISASI RENJA SKPA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENJA (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-7/6)	(9)	(10=9-7+9)	(11=10/4)		
3.27.01.1.08.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	12	Bln	12	Bln	100	12 Bln	12 Bln	100		
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasana Apanatur										
3.27.01.1.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor	12	Bln	12	Bln	100	10 Unit	10 Unit	100		
3.27.01.1.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	Bln	12	Bln	100	12 pkt	12 pkt	100		
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah										
3.27.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	12	Bln	12	Bln	100	12 Bln	12 Bln	100		
3.27.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selaras satu tahun	12	Bln	12	Bln	100	12 Bln	12 Bln	100		
3.27.01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Tertelaksananya Peringatan Perengkapan dan Perawatan Kantor	12	Bln	12	Bln	100	12 Bln	12 Bln	100		
3.27.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi/ Teknis Kegiatan tertelaksananya peningkatan kualitas pelayanan	12	Bln	12	Bln	100	12 Bln	12 Bln	100		
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasana Apanatur										
3.27.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertelaksananya Peringatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik	12	Bln	12	Bln	100	12 Bln	12 Bln	100		
3.27.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertelaksananya rehabilitasi gedung Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	12	Bln	12	Bln	100	13 pkt	13 pkt	100		
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD											
3.27.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tertelaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						12 Bln				
2.00.03.2.00.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KELAJAHTERAAN PETANI											
2.00.03.2.00.03.01.15.001	Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Tertelaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	142	Ks	142	Ks						
2.00.03.2.00.03.01.15.013	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Tertelaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna	40	Kp	40	Kp						
2.00.03.2.00.03.01.15.016	Kegiatan Panangan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah	Tertelaksananya Panangan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah	19	Unit	19	Unit						
2.00.03.2.00.03.01.15.017	Kegiatan Panangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar	Tertelaksananya Panangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar	96	Unit	96	Unit						
2.00.03.2.00.03.01.15.018	Kegiatan Panangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	Tertelaksananya Panangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	16	Keg	16	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.15.019	Kegiatan Panangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	Tertelaksananya Panangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	8	Kawasan	8	Kawasan						
2.00.03.2.00.03.01.15.020	Kegiatan Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah	Tertelaksananya Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah	32	Keg	32	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.15.021	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan	Tertelaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan	19	Keg	19	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.15.022	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	Tertelaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	20	Keg	20	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.15.023	Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Tertelaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota						
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
3.27.02.1.01.	Kegiatan Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian	Meningkatnya Indeks yang diteliti petani (0) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan										
3.27.02.1.01.01.	Sub Kegiatan Pengawasan Sarana Pupuk, Pestisida, Abiotan, dan Sarana Perekonding Pertanian	Tertelaksananya pendirian pupuk bersubsidi	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100	5000 Ha	5000 Ha	100
3.27.02.1.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian	Tertelaksananya Pengawasan dan pembinaan pendirian penitikan mesin pertanian/perkebunan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100
3.27.02.1.02.	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih Tanaman	Meningkatnya Indeks yang diteliti petani (0) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan										
3.27.02.1.02.01.	Sub Kegiatan Pengawasan Penedaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertelaksananya Pengawasan Penedaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100	5000 Ha	5000 Ha	100
3.27.02.1.02.02.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sibit Hortikultura	Tertelaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura Tertelaksananya Pengembangan Organisme Pengganggu tanaman	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	14 Keg	14 Keg	100	2 Komoditi	2 Komoditi	100
3.27.02.1.02.03.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sibit Tanaman Pangan	Tertelaksananya Pengembangan Kawasan Padi (MT Gadu).	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	65000 Ha	65000 Ha	100	5 Keg	5 Keg	100
3.27.02.1.02.04.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sibit Perkebunan	Tertelaksananya Penyediaan Sibit Tanaman Perkebunan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	5 Komoditi	5 Komoditi	100	5 Komoditi	5 Komoditi	100

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (2017-2022)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)			
					TARGET RENJA SKPA TAHUN 2021	REALISASI RENJA SKPA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET REALISASI (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-7/6)	(9)	(10-9-7-8)	(11-10-4)		
3.27.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Indeks yang diterima petani (It) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan										
3.27.02.1.03.04	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Tersedianya bahan sumber tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	185 Ha	185 Ha	100	11 Keg	11 Keg	100
2.00.03.2.00.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN											
2.00.03.2.00.03.01.19.039	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	20.090	Ha	20.090	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.039	Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Usaha Perkebunan Besar	Terlaksananya pembinaan dan penguasaan usaha perkebunan besar	23	Kab	23	Kab						
2.00.03.2.00.03.01.19.043	Kegiatan Pengembangan Perbaikan/Perbaikan Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Perbaikan/Perbaikan Tanaman Pangan	3	Kmnd	3	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.044	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbaikan tanaman pangan	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbaikan tanaman pangan	725	Ha	725	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.046	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbaikan tanaman hortikultura	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbaikan tanaman hortikultura	36	Paket	36	Paket						
2.00.03.2.00.03.01.19.047	Kegiatan Pengembangan Perbaikan/Perbaikan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Perbaikan/Perbaikan Tanaman Hortikultura	5	Kmnd	5	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.048	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Peryegar	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Peryegar	5	Kmnd	5	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.049	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	3	Kmnd	3	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.050	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbaikan perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbaikan perkebunan	5	Keg	5	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.19.051	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri berbi Pad	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Desa Mandiri berbi Pad	60	Ha	60	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.052	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbaikan Tanaman Pangan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbaikan Tanaman Pangan	2.600	Ha	2.600	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.053	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbaikan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbaikan Tanaman Hortikultura	11	Kmnd	11	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.054	Kegiatan Optimalisasi lahan pertanian	Terlaksananya Optimalisasi lahan pertanian	4.000	Ha	4.000	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.055	Kegiatan Perluasan Areal Pertanian	Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian	1.000	Ha	1.000	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.056	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanan	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanan	240	Unit	240	Unit						
2.00.03.2.00.03.01.19.057	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panan	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panan	135	Unit	135	Unit						
2.00.03.2.00.03.01.19.058	Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	12	Keg	12	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.19.059	Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan	8	Keg	8	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.19.062	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekarisasi Pertanian	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekarisasi Pertanian	32	Keg	32	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.19.063	Kegiatan Penyelenggaraan SLUD Mekarisasi Pertanian	Terselenggaranya SLUD Mekarisasi Pertanian	4	Keg	4	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.19.064	Kegiatan Pengembangan kawasan padi	Terlaksananya Pengembangan kawasan padi	280.000	Ha	280.000	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.065	Kegiatan Pengembangan kawasan jagung	Terlaksananya Pengembangan kawasan jagung	31.500	Ha	31.500	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.066	Kegiatan Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi	Terlaksananya Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi	7.500	Ha	7.500	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.069	Kegiatan Pengembangan Sentra Aneka Buah	Terlaksananya Pengembangan Sentra Aneka Buah	0	0	0	0						
2.00.03.2.00.03.01.19.069	Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman sayuran	Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman sayuran	3	Kmnd	3	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.072	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis	5	Kmnd	5	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.073	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul	5	Kmnd	5	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.074	Kegiatan Pengawasan Penerapan dan Sertifikasi Berbi Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengawasan Penerapan dan Sertifikasi Berbi Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	22	Kab	22	Kab						
2.00.03.2.00.03.01.19.075	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Berbi TPH dan perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Berbi TPH dan perkebunan	22	Kab	22	Kab						
2.00.03.2.00.03.01.19.076	Kegiatan Pengawasan penerapan dan sertifikasi Berbi unggul tanaman perkebunan	Terlaksananya Pengawasan penerapan dan sertifikasi Berbi unggul tanaman perkebunan	4	Kmnd	4	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.077	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	39	Keg	39	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.19.079	Kegiatan Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat	7.750	Ha	7.750	Ha						
2.00.03.2.00.03.01.19.080	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	16	Keg	16	Keg						
2.00.03.2.00.03.01.19.081	Kegiatan Perindugan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Perindugan Tanaman Perkebunan	16	Kab	16	Kab						
2.00.03.2.00.03.01.19.082	Kegiatan Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	Terlaksananya Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	12	Kmnd	12	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.083	Kegiatan Perindugan Tanaman Pangan	Terlaksananya Perindugan Tanaman Pangan	12	Kmnd	12	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.084	Kegiatan Perindugan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Perindugan Tanaman Hortikultura	12	Kmnd	12	Kmnd						
2.00.03.2.00.03.01.19.086	Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesawitran	Terlaksananya Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/ Pesawitran	12	Kab	12	Kab						
2.00.03.2.00.03.01.19.087	Kegiatan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersusipid dan Pestisida	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersusipid dan Pestisida	12	Kab	12	Kab						
2.00.03.2.00.03.01.19.088	Kegiatan Pembiayaan Pertanian	Terlaksananya Pembiayaan Pertanian	0	0	0	0						

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (2017-2022)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)	
			2017	2022	TARGET RENJA SKPA TAHUN 2021	REALISASI RENJA SKPA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-7/6)	(9)	(10=9*7-9)	(11=10/4)
2.00.03.2.00.03.01.19.089	Kegiatan Pengembangan Perbaikan/Perbibitan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan Perbaikan/Perbibitan Tanaman Perkebunan	12	Kab	12	Kab				
2.00.03.2.00.03.01.19.090	Kegiatan Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian	32	Keg	32	Keg				
2.00.03.2.00.03.01.19.091	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan pendirian peralatan mesin pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan pendirian peralatan mesin pertanian/perkebunan	23	Kab	23	Kab				
2.00.03.2.00.03.01.19.092	Kegiatan Pemberdayaan Keagrusan Blang (P3A/GP3A)	Terlaksananya Pemberdayaan Keagrusan Blang (P3A/GP3A)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.093	Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.094	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.095	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.099	Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbibitan Tanaman Pangan (SLPA Otsus) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbibitan Tanaman Pangan (SLPA Otsus)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.100	Pengembangan kawasan padi (SLPA Otsus) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan padi (SLPA Otsus)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.102	Pengembangan kawasan jagung (SLPA)	Terlaksananya Pengembangan kawasan jagung (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.103	Pengembangan sentra aneka buah (SLPA) (Bidang Hortikultura)	Terlaksananya Pengembangan sentra aneka buah (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.104	Pengembangan kawasan tanaman sayuran (SLPA) (Bidang Hortikultura)	Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman sayuran (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.105	Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (DBHCHT) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (DBHCHT)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.107	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar (SLPA Otsus) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar (SLPA Otsus)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.109	Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbibitan perkebunan (SLPA Otsus) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbaikan/perbibitan perkebunan (SLPA Otsus)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.111	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (SLPA) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.112	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (SLPA) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.113	Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat (SLPA Otsus) (Bidang Perbaikan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan)	Terlaksananya Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat (SLPA Otsus)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.114	Pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan besar (DBH) (Bidang Pengalihan dan Pemasaran Perkebunan)	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan besar (DBH)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.115	Optimalisasi lahan pertanian (SLPA) (Bidang Sanana dan Prasana)	Terlaksananya Optimalisasi lahan pertanian (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.117	Pengadaan Alat Mesin Pertanian Propanan (SLPA Otsus) (Bidang Sanana dan Prasana)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Propanan (SLPA Otsus)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.118	Pengadaan Alat Mesin Pertanian Propanan (SLPA) (Bidang Sanana dan Prasana)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Propanan (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.119	Peringatan Prasana Pertanian (Otsus) (Bidang Sanana dan Prasana)	Terlaksananya Peringatan Prasana Pertanian (Otsus)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.120	Peringatan Prasana Pertanian (SLPA) (Bidang Sanana dan Prasana)	Terlaksananya Peringatan Prasana Pertanian (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.122	Peringatan Prasana Perkebunan (SLPA) (Bidang Sanana dan Prasana)	Terlaksananya Peringatan Prasana Perkebunan (SLPA)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.123	Peringatan Sanana Prasana UPT Protokol TPH dan perkebunan (DAK) (UPTD Balai Protokol Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya Peringatan Sanana Prasana UPT Protokol TPH dan perkebunan (DAK)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.124	Peringatan Sanana Prasana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan (DAK) (UPTD Balai Benih Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya Peringatan Sanana Prasana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan (DAK)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.127	Penyenggaraan BLUD Mekarisasi Pertanian (SLPA BLUD) (UPTD Mekarisasi Pertanian)	Terlaksananya Penyenggaraan BLUD Mekarisasi Pertanian (SLPA BLUD)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.19.128	Pengembangan kawasan padi (Migas Kabupaten/Kota) (Bidang Tanaman Pangan)	Terlaksananya Pengembangan kawasan padi (Migas Kabupaten/Kota)	0	0	0	0				
2.00.03.2.00.03.01.25	PROGRAM PENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI									
2.00.03.2.00.03.01.25.001	Kegiatan Pencananaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Terselenggaranya sinkronisasi nancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	23	Kab	23	Kab				
2.00.03.2.00.03.01.25.003	Kegiatan Pencananaan pembangunan perkebunan	Terselenggaranya sinkronisasi nancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	23	Kab	23	Kab				
2.00.03.2.00.03.01.25.005	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH	23	Kab	23	Kab				
2.00.03.2.00.03.01.25.006	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH	Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH	23	Kab	23	Kab				
2.00.03.2.00.03.01.25.007	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan	23	Kab	23	Kab				
2.00.03.2.00.03.01.25.008	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan	Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan	23	Kab	23	Kab				

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (2017-2022)		REALISASI KINERJA CAPAIAN PROGRAM (2020)			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2022)	PERGARAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERKALAN (2022)	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8-7/6)	(9)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (RENJARA 2022)	(10= 5+7+9)	(11= 10/4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-7/6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
3.27.03.01.	Perbaikan Prasarana Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas											
3.27.03.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengalokasian Jalan Usaha Tani	Tertindakannya Peringatan Prasarana Pertanian	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	3 Keg	3 Keg	100	3 Keg	3 Keg	100	
3.27.03.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengalokasian Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Tertindakannya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengalokasian Lahan dan Air	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	100	2 keg	2 Keg	100	
3.27.03.01.09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tertindakannya Pertemuan Sosialisasi dan Pematapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	1290 Ha	1290 Ha	100	3 Keg	3 Keg	100	
3.27.03.01.10.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Tertindakannya Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana UPTD	3	Kab./Kota	3	Kab./Kota	3 UPTD						
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
3.27.05.1.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas											
3.27.05.1.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertindakannya Pengendalian OPT Tanaman Pertanian dan Perkebunan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	14 keg	14 Keg	100	4 keg	4 keg	100	
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
3.27.06.1.01.	Perserbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertibnya dan terwujudnya usaha perkebunan besar											
3.27.06.1.01.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Tertindakannya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100	12 Bln	12 Bln	100	
3.00.03.2.00.03.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN												
2.00.03.2.00.03.01.28.004	Peringatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya Peringatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian	12	Keg	12	Keg							
2.00.03.2.00.03.01.28.009	Pendidikan kejuruan Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	3	Unit	3	Unit							
2.00.03.2.00.03.01.28.010	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	23	Kab	23	Kab							
2.00.03.2.00.03.01.28.011	Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	24	Keg	24	Keg							
2.00.03.2.00.03.01.28.012	Kegiatan IPQWIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) Bidang Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya IPQWIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) Bidang Pertanian	4	Kab	4	Kab							
2.00.03.2.00.03.01.28.013	Updating Data dan Informasi Penyuluh Pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya Updating Data dan Informasi Penyuluh Pertanian	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota							
2.00.03.2.00.03.01.28.014	Kegiatan Supervisi penyuluhan pertanian (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya Supervisi penyuluhan pertanian	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota							
2.00.03.2.00.03.01.28.015	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Wilayah Kabupaten/Kota) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota							
2.00.03.2.00.03.01.28.016	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (SLPA Otisus) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota							
2.00.03.2.00.03.01.28.018	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (SLPA) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (SLPA)	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota							
2.00.03.2.00.03.01.28.019	Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian (SLPA Otisus) (Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan)	Tertindakannya Pendidikan bagi penyuluh pertanian (SLPA Otisus)	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota							
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
3.27.07.1.01.	Kegiatan Pengembangan Kemandirian Penyuluhan Pertanian	Tersedianya tenaga penyuluh yang inovatif dan informatif											
3.27.07.1.01.02.	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	6 Keg	6 Keg	100	4 keg	4 keg	100	
3.27.07.1.02.	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktik pertanian											
3.27.07.1.02.01.	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tertindakannya Inovasi Pemanfaatan dan Peralokasian Hasil Tanaman Pangan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota							
3.27.07.1.02.02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Tertindakannya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	28 Kelas	28 Kelas	100	8 Kelas	8 Kelas	100	
3.27.07.1.03.	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani											
3.27.07.1.03.01.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Tertindakannya Peringatan Kelembagaan dan SDM Petani	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	13 Keg	13 Keg	100	7 Keg	7 Keg	100	
3.27.07.1.03.02.	Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Tertindakannya IPQWIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) Bidang Pertanian, Peringatan Kelembagaan dan SDM Petani	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	13 Keg	13 Keg	100	14 Keg	14 Keg	100	
3.27.07.1.03.04.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lingsar Kelompok Tani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	22	Kab./Kota	22	Kab./Kota	3 SMK PP	3 SMK PP	100	3 SMK PP	3 SMK PP	100	

Keterangan :
1. Isian yang berwarna abu-abu merupakan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun dimaksud

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan Perkebunan serta Penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian sampai Kepala Seksi beserta stafnya serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- d. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

- perkebunan;
- k. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - m. Pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - n. Pembinaan UPTD; dan
 - o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017–2022. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2023

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	Indikator	SPM/Stand	IKK	Satuan	Target Renstra SKPA					Capaian Realisasi				Proyeksi		Hasil Analisis
		Nasional	PP 6 2008		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		3	4		6	7	8	9	10	11	11	11	12	13	14	
	Pertanian															
1	Nilai Tukar Petani				98	101	103	105	107	94,73	93,35	98,74	101,19	102,00	101,34	
2	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB			%	6,76	6,82	6,93	7,06	7,19	5,38	6,03**	6,1	5,48	7,19	6,13	
3	Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura Terhadap PDRB			%	4,49	4,68	4,7	4,85	5,10	3,70	4,23**	4,5	4,05	5,10	4,52	
4	Kontribusi Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB			%	7,94	8,21	8,48	8,75	9,03	7,92	7,19**	7,9	7,11	9,03	7,94	
5	Produktivitas Padi			Ton/Ha	5,43	5,58	5,72	5,86	6,01	5,51	5,5*	5,717	5,56	6,01	5,65	
6	Produksi Padi			Ton/Ha	2.539.311	2.625.047	2.713.675	2.805.293,00	2.900.000,00	2.527.111	2.108.722*	1.751.997	1.611.107	2.900.000,00	1.712.000	
7	Produksi Sektor Perkebunan			Ton	800.500	805.200	835.827	850.740	825.815	754.944	747.264*	704.738	960.694	825.815,00	764.858	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja masyarakat dan kontribusi dalam produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Kendala dan permasalahan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan saat ini seperti, optimalisasi sumber daya lahan pertanian masih rendah, alih fungsi lahan produktif (lahan sawah), akses petani terhadap lahan dan permodalan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani serta kinerja penyuluhan pertanian, jaminan pemasaran dan pengolahan hasil serta upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan yang masih lemah, hal ini mengakibatkan laju pembangunan pertanian khususnya sektor tanaman pangan belum berjalan sesuai harapan.

Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan sinergitas pihak terkait, kesamaan persepsi dan sinkronisasi yang kuat, tanpa ini rencana kerja yang sudah disusun dan kita tetapkan pasti akan berjalan tidak sesuai seperti yang kita harapkan, untuk itu pihak kami mengharapkan semua pihak terkait agar dapat melakukan persiapan-persiapan, sinergitas antara pihak terkait pelaksana koordinasi yang inten di daerah masing-masing karena pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada saat ini ada disektor pertanian dan perkebunan.

Adapun kebijakan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan pada tahun 2023 seabgai mana tersebut dalam RENSTRA 2023-2026 adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19”.

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Tahun 2023.

Analisa Kebutuhan Rencana Kerja Awal Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023, sebagaimana Tabel T-C.31 Review terhadap Rencana Awal RKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023 terdapat pada 6 Program, 16 Kegiatan dan

37 Sub Kegiatan, tersebar pada kegiatan Teknis dan non teknis Sekretariat, 5 Bidang Teknis, 4 UPTD dan 3 SMKPP dibutuhkan anggaran kegiatan sebesar Rp.146.812.592.800.-

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

Tabel T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2023

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH													
RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan	
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				150.880.751.844	3	27				150.880.751.844		
3	27	01			115.385.751.844	3	27	01			115.385.751.844		
3	27	01	1.81		3.590.000.000	3	27	01	1.81		3.590.000.000		
3	27	01	1.01	04		3	27	01	1.01	04			
					3.000.000.000						3.000.000.000		
3	27	01	1.01	06		3	27	01	1.01	06			
					500.000.000						500.000.000		
3	27	01	1.82			3	27	01	1.82				
					78.016.751.844						78.016.751.844		
3	27	01	1.02	01		3	27	01	1.02	01			
					78.016.751.844						78.016.751.844		
3	27	01	1.85			3	27	01	1.85				
					290.000.000						290.000.000		
3	27	01	1.05	09		3	27	01	1.05	09			
					190.000.000						190.000.000		
3	27	01	1.05	10		3	27	01	1.05	10			
					100.000.000						100.000.000		
3	27	01	1.86			3	27	01	1.86				
					2.155.000.000						2.155.000.000		
3	27	01	1.06	01		3	27	01	1.06	01			
					150.000.000						150.000.000		
3	27	01	1.06	04		3	27	01	1.06	04			
					840.000.000						840.000.000		
3	27	01	1.06	05		3	27	01	1.06	05			
					220.000.000						220.000.000		
3	27	01	1.06	06		3	27	01	1.06	06			
					145.000.000						145.000.000		
3	27	01	1.06	09		3	27	01	1.06	09			
					800.000.000						800.000.000		
3	27	01	1.87			3	27	01	1.87				
					8.441.000.000						8.441.000.000		
3	27	01	1.07	09		3	27	01	1.07	09			
					7.207.000.000						7.207.000.000		
3	27	01	1.07	10		3	27	01	1.07	10			
					1.234.000.000						1.234.000.000		
3	27	01	1.88			3	27	01	1.88				
					10.990.000.000						10.990.000.000		
3	27	01	1.08	01		3	27	01	1.08	01			
					40.000.000						40.000.000		
3	27	01	1.08	02		3	27	01	1.08	02			
					2.450.000.000						2.450.000.000		
3	27	01	1.08	03		3	27	01	1.08	03			
					600.000.000						600.000.000		
3	27	01	1.08	04		3	27	01	1.08	04			
					7.000.000.000						7.000.000.000		
3	27	01	1.89			3	27	01	1.89				
					11.893.000.000						11.893.000.000		
3	27	01	1.09	02		3	27	01	1.09	02			
					4.030.000.000						4.030.000.000		
3	27	01	1.09	09		3	27	01	1.09	09			
					7.863.000.000						7.863.000.000		
Peningkatan Pelayanan BLUD						Peningkatan Pelayanan BLUD							
					1.000.000.000						1.000.000.000		
					1.000.000.000						1.000.000.000		

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	2 Kegiatan	587.000.000	3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	2 Kegiatan	587.000.000			
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5 Kegiatan	2.094.000.000	3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5 Kegiatan	2.094.000.000			
3 27 02 1.01 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.	Banda Aceh	Tersedianya Bangunan Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.	4 Unit	100.000.000	3 27 02 1.01 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.	Kab./Kota	Tersedianya Bangunan Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.	4 Unit	100.000.000			
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6 Komoditi	902.000.000	3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6 Komoditi	902.000.000			
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	1. Terlaksananya Pengembangan Cabe Merah. 2. Terlaksananya Pengembangan bawang Merah.	11 Komoditi	4.510.000.000	3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	1. Terlaksananya Pengembangan Cabe Merah. 2. Terlaksananya Pengembangan bawang Merah.	11 Komoditi	4.510.000.000			
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab./Kota	1. Promosi dan Pemasaran Inovasi Teknologi 1 Keg. 2. Terlaksananya Inovasi teknologi Pasca Panen Tanaman Pangan 4 Keg. 3. Terlaksananya Budidaya Padi Organik 250 Ha. 4. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung 1.000 Ha. 5. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi 8.000 Ha. 6. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Cluster IP 300 1.500 Ha.	1 Keg. 4 Keg. 250 Ha 1.000 Ha 8.000 Ha 1.500 Ha	8.052.000.000	3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab./Kota	1. Promosi dan Pemasaran Inovasi Teknologi 1 Keg. 2. Terlaksananya Inovasi teknologi Pasca Panen Tanaman Pangan 4 Keg. 3. Terlaksananya Budidaya Padi Organik 250 Ha. 4. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung 1.000 Ha. 5. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi 8.000 Ha. 6. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Cluster IP 300 1.500 Ha.	1 Keg. 4 Keg. 250 Ha 1.000 Ha 8.000 Ha 1.500 Ha	8.052.000.000			
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab./Kota	1. Tersedianya Bibit Pinang Unggul Betara 30.500 Btg. 2. Tersedianya Bibit Pinang Unggul Lokal 63.200 Btg. 3. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Kopi Robusta 100 Ha. 4. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Kakao Klonal 30 Ha. 5. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Nilam 60 Ha. 6. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Kopi Arabika 134 Ha. 7. Terpeliharanya Kebun Tanaman Kakao 185 Ha. 8. Terpeliharanya Kebun Tanaman Kelapa Sawit 235 Ha.	30.500 Btg. 62.200 Ha 100 Ha 30 Ha 60 Ha 134 Ha 185 235 Ha	6.883.000.000	3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab./Kota	1. Tersedianya Bibit Pinang Unggul Betara 30.500 Btg. 2. Tersedianya Bibit Pinang Unggul Lokal 63.200 Btg. 3. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Kopi Robusta 100 Ha. 4. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Kakao Klonal 30 Ha. 5. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Nilam 60 Ha. 6. Bertambahnya Luas Areal Komoditi Kopi Arabika 134 Ha. 7. Terpeliharanya Kebun Tanaman Kakao 185 Ha. 8. Terpeliharanya Kebun Tanaman Kelapa Sawit 235 Ha.	30.500 Btg. 62.200 Ha 100 Ha 30 Ha 60 Ha 134 Ha 185 235 Ha	6.883.000.000			
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Pro						3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Pro						
3 27 02 1.03 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	200 Ha	867.000.000	3 27 02 1.03 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kab./Kota	Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	200 Ha	867.000.000			
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	2 Keg	250.000.000	3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	2 Keg	250.000.000			
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	2 Keg	300.000.000	3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	2 Keg	300.000.000			

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2023

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	2 Keg	300.000.000	3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	2 Keg	300.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					700.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					700.000.000	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					700.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					700.000.000	
3 27 05 01. 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	1. Terlaksananya Gerdal OPT Perkebunan 4 Unit. 2. Terlaksananya Kajian Teknologi Pengendalian OPT 4 Keg. 3. Terlaksananya Pengendalian OPT 10 Unit. 4. Terlaksananya Perbanyakkan Metabolit Sekunder APH 1.500 Ltr.	4 Unit 4 Keg. 10 Unit 1.500 Ltr.	700.000.000	3 27 05 01. 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	1. Terlaksananya Gerdal OPT Perkebunan 4 Unit. 2. Terlaksananya Kajian Teknologi Pengendalian OPT 4 Keg. 3. Terlaksananya Pengendalian OPT 10 Unit. 4. Terlaksananya Perbanyakkan Metabolit Sekunder APH 1.500 Ltr.	4 Unit 4 Keg. 10 Unit 1.500 Ltr.	700.000.000	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.000.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.000.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000	
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	3 Keg	1.000.000.000	3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	3 Keg	1.000.000.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					8.950.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					8.950.000.000	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					550.000.000	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					550.000.000	
3 27 07 1.01 02	Keja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	4 Keg	550.000.000	3 27 07 1.01 02	Keja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	4 Keg	550.000.000	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					650.000.000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					650.000.000	
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2 Kis	650.000.000	3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2 Kis	650.000.000	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					7.750.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					7.750.000.000	
3 27 07 1.03 01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	2 Keg	450.000.000	3 27 07 1.03 01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	2 Keg	450.000.000	
3 27 07 1.03 02.	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koperasi Petani.	8 Keg	300.000.000	3 27 07 1.03 02.	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Kab./Kota	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koperasi Petani.	8 Keg	300.000.000	
3 27 07 1.03 04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab./Kota	1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2. Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	Dinas dan 3 SMK PP	7.000.000.000	3 27 07 1.03 04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab./Kota	1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2. Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	Dinas dan 3 SMK PP	7.000.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRa serta Hasil Desk Musrenbang Kabupaten/Kota Bersama Bappeda Aceh serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, adalah sebagai berikut (Terlampir T-32). Usulan Program/Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				
1.01	01 Terlaksananya Pengawasan Peredaran pupuk bersubsidi	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Paket	
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				
1.02	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	24 Paket	
1.02	03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab./Kota	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Paket	
1.02	04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	8 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua. Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

3.1.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan

pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

3.1.2. Strategi Kementerian Pertanian

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan

kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

b. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah
2. Peningkatan daya saing pertanian

c. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air

2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian

d. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah sebagai berikut :

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
6. Penguatan kelembagaan petani

3.1.3. Program Kementerian Pertanian

Pada awal tahun 2023, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan adanya perancangan kembali (redesign) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah menjadi :

a. Dukungan Manajemen

Sasaran Program sebagai berikut :

- Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan
- Meningkatnya kualitas pengawasan internal
- Meningkatnya maturitas SPIP.

- b. Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
- c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 - Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
- d. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Meningkatnya ketersediaan pangan strategis
 - Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
 - Terjaminnya keamanan dan mutu pangan
 - Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan.
 - Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri
 - Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
 - Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
 - Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati.
 - Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.
- e. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
 - Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu:

- a. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- b. Swasta, BUMN, dan BUMD;
- c. Investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA);

- d. Lembaga keuangan dan perbankan (skema kredit dan kredit komersial); dan
- e. Swadaya masyarakat.

Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian sangatlah besar. Sebagian besar merupakan pembiayaan bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Tahun 2023.

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan untuk Perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dan Utama dalam Perencanaan Pembangunan berupa Rencana Kerja Program/Kegiatan baik jangka menengah daerah maupun program/kegiatan setiap tahun berjalan terutama pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama 1 (satu) tahun, yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan melalui SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka tujuan Rencana Kerja (Renja) dalam rangka Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Lanjutan mewujudkan *Good Government* dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, efektivitas *pengawasan* kinerja untuk pelayanan publik.
- b. Meningkatkan sistem distribusi sarana produksi (Saprodi) dan hasil panen agar memenuhi kaidah 6 (enam) Tepat, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat tempat dan tepat guna. Sehingga upaya penambahan luas areal penanaman, meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat dicapai.

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

- c. Meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan (Penetapan Kawasan dan IP300), hortikultura dan perkebunan serta pengembangan pemasaran hasil produk pertanian unggulan daerah melalui penelitian, pelatihan, promosi di tingkat Daerah, Nasional dan Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan penerapan prasarana dan sarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian perkebunan.
- e. Menumbuhkembangkan dan memantapkan sentra-sentra agribisnis sehingga membentuk kawasan komoditas spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berbasis korporasi.
- f. Peningkatan sistem peramalan, pengkajian, pengendalian dalam rangka penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan.
- g. Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan melalui Peningkatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Peningkatan Akreditasi Penyuluh Pertanian Lapangan.
- h. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- i. Membuka peluang kerjasama integrasi lintas sektor guna menghadirkan koorporasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kemandirian petani.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RENJA Tahun 2023 serta Perkiraan Maju Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Program Spesifik SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, serta penyesuaian sebagaimana yang tercantum dalam RPA dan RENSTRA Perbaikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN;
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN;
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN;
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN;
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN;

Adapun Hasil Analisis Berdasarkan Rancangan Awal Pagu Indikatif Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 146.812.592.800.-** Terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 96.046.600.000.- dan Program Spesifik sebesar Rp. 50.765.992.800.- Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju untuk Tahun 2024 sebesar **Rp. 156.944.000.000.-**. Rincian Rencana Program/Kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024, sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (3).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (3.27).

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01).

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 1.864.870.600.- terdiri dari dua sub kegiatan antara lain Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dengan keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan, Sedangkan perkiraan pagu indikatif maju pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.150.000.000.-

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 831.750.724 Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.200.000.000

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 551.603.758 dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.200.000.000

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 481.516.118, dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 750.000.000.-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 77.065.652.000.- pada Tahun 2023. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2024 sebesar Rp. 81.917.000.000.-

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 77.065.652.000.-, dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 81.917.000.000.-

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 95.044.000.- pada Tahun 2023. Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju pada Tahun 2024 sebesar Rp. 250.000.000.-

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 45.044.000,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 1.839.922.375,- sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.965.000.000,-

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 647.276.665,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 750.000.000,-

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 199.997.710,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 220.000.000,-

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 44.942.000,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 45.000.000,-

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 797.706.000,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 800.000.000,-

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 775.000.000,- sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.300.000.000,-

1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 402.000.000,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 800.000.000,-

2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 373.000.000,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 500.000.000,-

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 9.158.111.025, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.840.000.000,

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 19.855.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 40.000.000,

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 2.013.673.800, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.300.000.000,

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 618.120.840,- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 750.000.000,-

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 6.506.461.385.- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.750.000.000.-

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 4.548.000.000,

sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.556.000.000.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 3.400.000.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.200.000.000.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 1.148.000.000, Dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gedung perkantoran yang merupakan aset daerah, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.356.000.000.

- h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 700.000.000, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.200.000.000.

3. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, merupakan pendukung dari Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 700.000.000, Dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.200.000.000.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3.27.02).

a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 38.003.772.800, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 36.216.000.000.

1. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.

Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 4.800.000.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 750.000.000.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 2.182.840.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, sedangkan

perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.400.000.000.

b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman merupakan kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 29.438.612.800, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 31.366.000.000.

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.

Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 1.341.620.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Sertifikat Benih, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.700.000.000.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 14.351.275.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.000.000.000.

3. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan.

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, pada tahun anggaran 2023

diperkiraan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 6.500.890.956, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.500.000.000.

4. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, pada tahun anggaran 2023 diperkiraan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 7.244.826.844, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.166.000.000.

- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi pada tahun anggaran 2023 diperkiraan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 1.582.320.000, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.700.000.000.

1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme.

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme., merupakan pendukung dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, pada tahun anggaran 2023 diperkiraan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 1.582.320.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan

Mikroorganisme, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.700.000.000.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03).

a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian merupakan kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 557.400.000, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.450.000.000,-

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 155.000.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, sedangkan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 450.000.000.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 277.400.000, Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp.550.000.000.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 125.000.000.- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 450.000.000.-

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (3.27.05).

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi merupakan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 2.054.820.000, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.500.000.000.-

1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp.2.054.820.000.- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.500.000.000.-

V. Program Perizinan Usaha Pertanian (3.27.06).

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan penunjang kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 847.600.000.- Dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000.-

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 847.600.000.- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000.-

VI. Program Penyuluhan Pertanian (3.27.07).

- a. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan Penunjang kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 495.000.000.- Dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp.750.000.000.-

1. Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.

Sub Kegiatan Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 495.000.000.- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 750.000.000.-

b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian merupakan Penunjang kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 496.200.000.- sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 750.000.000.-

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani., merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 496.200.000.- Dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 750.000.000.-

c. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 8.311.200.000,- sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.100.000.000,-

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

1. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani.

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 796.400.000.- dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 950.000.000.-

2. Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.

Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp.100.000.000,- dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. 150.000.000,-

3. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, pada tahun anggaran 2023 diperkirakan pagu indikatif dibutuhkan sebesar Rp. 7.414.800.000,- dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi, sedangkan perkiraan perkiraan pagu indikatif pada tahun 2024 sebesar Rp. Rp.8.000.000.000,-

Dari berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik Rencana Awal RKPA Tahun 2023 maupun Rencana Maju RKPA Tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap dan rinci pada *Tabel T-C.33 berikut :*

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

Tabel T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target capaian kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								146.812.592.900					156.944.000.000
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								96.046.600.000					105.178.000.000
1.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.864.870.600					3.159.000.000
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Realisasi Perencanaan dan Penganggaran	Banda Aceh	95%	4 Dokumen	95%	831.750.724	PAA/DAU		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	1.200.000.000
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tercapainya Realisasi Perencanaan dan Penganggaran	Banda Aceh	95%	4 Dokumen	95%	551.603.758	PAA/DAU		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	1.200.000.000
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Realisasi Perencanaan dan Penganggaran	Banda Aceh	95%	2 Laporan	95%	481.516.118	PAA/DAU		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	750.000.000
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								77.065.652.000					81.917.000.000
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbanyanya administrasi Keuangan	Banda Aceh	95%	645 Org/Bulan	12 Bln	77.065.652.000	PAA/DAU		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	81.917.000.000
1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								95.044.000					250.000.000
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya aparatur yang memenuhi kompetensi	Banda Aceh	95%	4 Org	20 Org	45.044.000	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	150.000.000
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya aparatur yang memenuhi kompetensi	Banda Aceh	95%	100 Org	20 Org	50.000.000	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	100.000.000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.839.922.375					1.965.000.000
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan publik.	Banda Aceh	95%	3 Pkt	12 Bln	150.000.000	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	98%	150.000.000
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan publik.	Banda Aceh	95%	7 Pkt	12 Bln	647.276.665	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	750.000.000
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan publik.	Banda Aceh	95%	11 Pkt	12 Bln	199.997.710	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	220.000.000
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya pelayanan publik.	Banda Aceh	95%	6 Dokumen	12 Bln	44.942.000	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	90%	45.000.000
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelayanan publik.	Banda Aceh	95%	1 Laporan	12 Bln	797.706.000	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	90%	800.000.000
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								775.000.000					1.300.000.000
1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	95%	2 Unit	12 Bln	402.000.000	PAA/OTSUS		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	800.000.000
1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	95%	65 Unit	12 Bln	373.000.000	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	500.000.000
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9.158.111.025					9.840.000.000
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	95%	1 Laporan	12 Bln	19.855.000	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	40.000.000
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	95%	1 Laporan	12 Bln	2.013.673.800	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	2.300.000.000

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target capaian kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur				Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Tertaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	90%	1 Laporan	12 Bln	618.120.840	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	90%	750.000.000
1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tertaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	90%	1 Laporan	12 Bln	6.506.461.385	PAA		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	90%	6.750.000.000
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.548.000.000						5.556.000.000
1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tertaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	95%	437 Unit	12 Bln	3.400.000.000	OTSUS		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	4.200.000.000
1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tertaksananya kegiatan kedinasan dan pelayanan publik	Banda Aceh	95%	19 Unit	12 Bln	1.148.000.000	OTSUS		Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95%	1.356.000.000
1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							700.000.000						1.200.000.000
1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tertaksananya Pelayanan Publik BLUD	Kab. Aceh Besar	95 %	1 Unit Kerja	12 Bulan	700.000.000	Pendapatan dari BLUD		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95 %	1.200.000.000
02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							38.003.772.800						36.216.000.000
1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							6.982.840.000						3.150.000.000
1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	tersedianya pupuk bersubsidi	Kab. Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tamiang	5,65 Ton/Ha	1 Laporan	12 bulan	4.800.000.000	OTSUS		Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	5,65 Ton/Ha	750.000.000
1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	tersedianya pupuk bersubsidi	Kab. Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie	5,65 Ton/Ha	1 Dokumen	12 bulan	2.182.840.000	OTSUS		Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	65 Ton/Ha	2.400.000.000
1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							29.438.612.800						31.366.000.000
1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Jumlah Sertifikat Benih	Tercapainya produksi padi	Kab. Aceh Timur, Kab. Bireuen, Kota Lingsa, Kab. Aceh Tamiang	5,65 Ton/Ha	545 Sertifikat	2.011.536 Ton	1.341.620.000	OTSUS		Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	5,65 Ton/Ha	1.700.000.000
1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Tercapainya produksi hortikultura	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Pidie Jaya.	5,65 Ton/Ha	1 Laporan	2.011.536 Ton	14.351.275.000	OTSUS		Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	5,65 Ton/Ha	16.000.000.000
1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Tercapainya produksi padi	Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.	5,65 Ton/Ha	1 Dokumen	2.011.536 Ton	6.500.890.956	OTSUS		Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	5,65 Ton/Ha	8.500.000.000
1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Tercapainya produksi perkebunan	Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Jaya, Kab. Gayo Lues, Kab. Bener Meriah, Kab. Pidie Jaya.	5,65 Ton/Ha	1 Laporan	2.011.536 Ton	7.244.826.844	DBHCHT/ SOTSUS		Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	5,65 Ton/Ha	5.166.000.000
1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanangan Provinsi							1.582.320.000						1.700.000.000
1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Tersedianya benih unggul pada komoditi utama pertanian	Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kota Banda Aceh.	5,65 Ton/Ha	1 Laporan	3 Komoditi	1.582.320.000	OTSUS		Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	5,65 Ton/Ha	1.700.000.000
03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							557.400.000						1.450.000.000
1.01		Penataan Prasarana Pertanian							557.400.000						1.450.000.000

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target capaian kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
1																		
1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	terlaksananya koordinasi pengelolaan prasarana pertanian	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tamiang.	23,81 %	1 Dokumen	3 Kali	155.000.000	OTSUS		Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	23,81 %	450.000.000			
1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	terlaksananya koordinasi pengelolaan prasarana pertanian	Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tamiang.	23,81 %	1 Dokumen	3 Kali	277.400.000	OTSUS		Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	23,81 %	550.000.000			
1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	terlaksananya koordinasi pengelolaan prasarana pertanian	Kab. Aceh Selatan, Kab. Pidie Jaya.	23,81 %	1 Laporan	3 Kali	125.000.000	OTSUS		Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	23,81 %	450.000.000			
05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										2.054.820.000					2.500.000.000			
05.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi										2.054.820.000					2.500.000.000			
01.	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Keberhasilan Panen	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Tertanganinya lahan dari bencana dan gangguan OPT	Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie.	95 %	25598 Ha	20026 Ha	2.054.820.000	OTSUS		Persentase Keberhasilan Panen	95 %	2.500.000.000			
06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN										847.600.000					1.000.000.000			
1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										847.600.000					1.000.000.000			
1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Terbinanya perusahaan	Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara.	70 %	10 Laporan	50 Perusah	847.600.000	OTSUS		Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	70 %	1.000.000.000			
07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										9.302.400.000					10.600.000.000			
1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian										495.000.000					750.000.000			
1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Terbinanya penyuluh pertanian	Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Utara, Kab. Gayo Lues, Kab. Bener Meriah.	11,45 %	40 Orang	80 Orang	495.000.000	SOTSUS		Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	11,45 %	750.000.000			
1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										496.200.000					750.000.000			
1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Terlatihnya petani/kelompok tani	Kab. Bireuen, Kab. Pidie, Kab. Gayo Lues, Kab. Pidie Jaya	11,45%	6 Kelompok	140 Org	496.200.000	SOTSUS		Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	11,45%	750.000.000			
1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										8.311.200.000					9.100.000.000			
1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Terbinanya KEP	Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Utara.	11,45%	1 Unit	14 Kelompok	796.400.000	SOTSUS		Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	11,45 %	950.000.000			
1.03	02	Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	Terbinanya KEP	Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen.	11,45 %	1 Laporan	14 Kelompo	100.000.000	SOTSUS		Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	11,45 %	150.000.000			
1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Terbinanya KEP	Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Bireuen.	11,45 %	3 SMKPP	14 Kelompo	7.414.800.000	SOTSUS		Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	11,45 %	8.000.000.000			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023 Disusun Berdasarkan RPJM Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Rencanakan pada Rencana Awal untuk pembiayaan Pembangunan Pertanian dalam Rangka Peningkatan Provitas sebesar **Rp. 146.812.592.800,-** sebagai berikut:

Prog.	Keg.	Sub Kegiatan	Tahun 2022
		Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.	146.812.592.800
01.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	96.046.600.000
	01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.864.870.600
	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	831.750.724
	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	551.603.758
	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	481.516.118
	02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.065.652.000
	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.065.652.000
	05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.044.000
	09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.044.000
	10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
	06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.839.922.375
	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
	04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	647.276.665
	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.997.710
	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.942.000
	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	797.706.000
	07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	775.000.000
	09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	402.000.000
	10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	373.000.000
	08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.158.111.025
	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.855.000
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.013.673.800
	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	618.120.840
	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.506.461.385
	09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.548.000.000
	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.400.000.000
	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.148.000.000

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2023

Prog.	Keg.	Sub Kegiatan	Tahun 2023
	10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	700.000.000
	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	700.000.000
02.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.		38.003.772.800
	01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	6.982.840.000
	01.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.800.000.000
	02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.182.840.000
	02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	29.438.612.800
	01.	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	1.341.620.000
	02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	14.351.275.000
	03.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	6.500.890.956
	04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	7.244.826.844
	03.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.582.320.000
	04.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.582.320.000
03.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.		557.400.000
	01.	Penataan Prasarana Pertanian	557.400.000
	03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.	155.000.000
	04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.	277.400.000
	09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.	125.000.000
05.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.		2.054.820.000
	01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.054.820.000
	01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.054.820.000
06.	Program Perizinan Usaha Pertanian		847.600.000
	01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	847.600.000
	03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	847.600.000

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

Prog.	Keg.	Sub Keegiatab	Tahun 2023
07.		Program Penyuluhan Pertanian.	9.302.400.000
	01.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	495.000.000
	02.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	495.000.000
	02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	496.200.000
	02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	496.200.000
	03.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	8.311.200.000
	01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi	796.400.000
	02.	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	100.000.000
	04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	7.414.800.000

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023 ini Merupakan penerjemahan RKPA Tahun 2023 dan Hasil Analisis Pagu Indikatif, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) akan menjadi Dokumen Perencanaan dan Acuan Kerja bagi seluruh Jajaran Bidang Teknis, UPTD dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-ABPA) Tahun 2023.

Sebanyak 7 Program dan (16) Kegiatan serta (37) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Renja 2022 serta besaran Pagu Indikatif sebesar **Rp. 146.812.592.800,-** sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Melalui Renja ini dapat terlihat bahwa dari 6 (enam) Program direncanakan pagu indikatif pelaksanaan Program/Kegiatan ini memiliki berbagai perubahan yang terjadi dan mempengaruhi pembangunan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perkebunan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan pada Penyusunan Dokumen Rancangan Kerja serta Penetapan PPAS melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh,

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2023

apabila dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2023 ini.

Banda Aceh, Mei 2022
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'CUT HUZAIMAH'.

A handwritten mark in blue ink, possibly a stylized 'A' or a similar symbol, positioned to the right of the signature.

Ir. CUT HUZAIMAH, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660217 199203 2 003